

Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Bimbingan Konseling: Analisis Peran Konselor, Layanan BK, Dan Supervisi Konseling Di Satuan Pendidikan

Afifa Husnul Khotimah Purba¹, Syifa Urrahmah², Wahyunisa³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,3},

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh²,

Email: afifapurbaa@gmail.com¹, syifaurrehmah@ummah.ac.id², wahyunisa@uinsu.ac.id³

Abstrak. Implementasi Kurikulum Merdeka membawa perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan Indonesia, khususnya dalam mendorong pembelajaran yang fleksibel, humanis, dan berpusat pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif bimbingan konseling (BK), dengan fokus pada peran konselor, layanan BK, serta supervisi konseling di satuan pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelaahan buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, dokumen resmi pemerintah, serta hasil riset terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan guru maupun konselor terhadap Kurikulum Merdeka masih beragam, sementara ketimpangan infrastruktur—terutama di daerah 3T—menghambat optimalisasi layanan pembelajaran dan BK. Kurikulum Merdeka memberikan peluang penguatan asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, layanan responsif, bimbingan kelompok, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan pengembangan karakter. Konselor berperan strategis dalam mendukung well-being siswa pasca pandemi, termasuk menangani learning loss, kecemasan belajar, dan masalah adaptasi sosial. Namun, lemahnya sistem supervisi konseling dan terbatasnya sumber daya menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh kolaborasi multi-pihak, peningkatan kompetensi konselor, pemerataan fasilitas, serta penguatan supervisi layanan BK.

Kata Kunci. *Kurikulum Merdeka, Bimbingan Konseling, Konselor Sekolah, Supervisi Konseling*

Abstract. The implementation of the Independent Curriculum has brought fundamental changes to the Indonesian education paradigm, particularly in promoting flexible, humanistic, and student-centered learning. This study aims to analyze the implementation of the Independent Curriculum from a guidance and counseling (BK) perspective, focusing on the role of counselors, BK services, and counseling supervision in educational units. The study used a literature review method with a descriptive qualitative approach through a review of scientific books, national and international journals, official government documents, and previous research findings. The study results indicate that teachers' and counselors' understanding and readiness for the Independent Curriculum remain diverse, while infrastructure disparities—especially in the 3T (frontier and remote) regions—hinder the optimization of learning and BK services. The Independent Curriculum provides opportunities for strengthening diagnostic assessments, differentiated learning, responsive services, group guidance, and strengthening the Pancasila Student Profile through character development activities. Counselors play a strategic role in supporting student well-being post-pandemic, including addressing learning loss, learning anxiety, and social adaptation issues. However, a weak counseling supervision system and limited resources present significant obstacles. This study concludes that the successful implementation of the Independent Curriculum is greatly influenced by multi-party collaboration, increased counselor competency, equal distribution of facilities, and strengthened supervision of guidance and counseling services.

Keywords. *Independent Curriculum, Guidance And Counseling, School Counselors, Counseling Supervision*

PENDAHULUAN

Perubahan dalam sistem pendidikan merupakan suatu keniscayaan untuk menjawab dinamika perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan pasca pandemi COVID-19 yang telah memperlihatkan adanya ketimpangan pembelajaran. Kurikulum Merdeka hadir sebagai inovasi pemerintah untuk mentransformasi praktik pendidikan yang selama ini dianggap terlalu kaku, seragam, dan kurang memberi ruang bagi perkembangan potensi peserta didik secara individual. Melalui kebijakan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menegaskan pentingnya *kebebasan belajar*, otonomi sekolah, serta peran guru sebagai fasilitator yang mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, karakteristik, dan tahap perkembangan psikologis siswa.

Dalam perspektif psikologi pendidikan dan bimbingan konseling (BK), Kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas perubahan struktur kurikulum, tetapi menjadi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih humanis, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Konsep *merdeka belajar* sejalan dengan prinsip-prinsip BK yang menekankan fasilitasi perkembangan akademik, sosial, emosional, dan karier secara komprehensif. Guru dan konselor dituntut mampu membangun hubungan kolaboratif dengan peserta didik untuk membantu mereka menemukan makna belajar, mengembangkan potensi diri, serta mengatasi hambatan psikologis maupun lingkungan (Aziza and Yulia 2022). Namun, implementasi Kurikulum Merdeka juga memunculkan berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan praktik BK, seperti Kesiapan kompetensi guru BK dan konselor dalam memahami paradigma kurikulum baru. Keterbatasan layanan dan sarana BK untuk mendukung asesmen diagnostik, layanan responsif, maupun program pengembangan diri. Kebutuhan supervisi konseling yang lebih terstruktur guna memastikan kualitas layanan sejalan dengan tuntutan kurikulum (Alaika M, 2020).

Peran konseling masyarakat dalam mendukung sekolah, khususnya di daerah yang mengalami hambatan sosial-ekonomi. Penataan kurikulum BK agar selaras dengan profil pelajar Pancasila, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan well-being peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan analisis literatur yang komprehensif untuk memahami pelaksanaan Kurikulum Merdeka dari perspektif pendidikan bimbingan konseling, profesi konselor, supervisi layanan, psikologi pendidikan, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik konseling di sekolah. Kajian ini menjadi penting agar Kurikulum Merdeka tidak hanya berhasil dalam aspek akademik, tetapi juga dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, dan perkembangan holistik peserta didik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggambarkan, menafsirkan, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang relevan terkait implementasi Kurikulum Merdeka dari perspektif pendidikan, psikologi pendidikan, serta layanan bimbingan konseling. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis mendalam terhadap konsep, tantangan, serta implikasi kebijakan kurikulum berdasarkan kajian karya ilmiah dan dokumen resmi. Bahan utama dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah tentang kebijakan pendidikan, jurnal akademik nasional dan internasional yang membahas Kurikulum Merdeka, psikologi pendidikan, dan bimbingan konseling, serta dokumen resmi pemerintah seperti Permendikbud, modul Merdeka Mengajar, dan artikel kebijakan Kemendikbudristek (Sugiyono 2022).

Selain itu, hasil penelitian sebelumnya yang mengulas tentang kesiapan sekolah dan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka turut dijadikan rujukan penting. Untuk mempermudah pengelolaan data, penelitian ini memanfaatkan berbagai alat seperti database literatur (Google Scholar, DOAJ, Sinta, ResearchGate, dan Perpustakaan e-resources), aplikasi manajemen referensi seperti Zotero atau Mendeley, serta catatan penelitian untuk merangkum temuan-temuan penting. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dari identifikasi sumber literatur menggunakan kata kunci seperti “Kurikulum Merdeka”, “implementasi kurikulum”, “bimbingan konseling”, “psikologi pendidikan”, dan “kompetensi guru”. Selanjutnya, peneliti melakukan seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu, seperti diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, memiliki relevansi yang kuat dengan topik penelitian, serta berasal dari sumber akademik yang kredibel. Literatur yang terpilih kemudian dibaca secara kritis, disarikan poin-poin pentingnya, dan dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu, seperti tantangan implementasi, kesiapan guru, kebijakan pendidikan, serta peran layanan BK (Fayrus and Slamet 2022).

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data melalui pemilihan literatur yang paling relevan, diikuti dengan pengelompokan data berdasarkan tema. Selanjutnya dilakukan sintesis untuk menghubungkan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai implementasi Kurikulum Merdeka. Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi dan merumuskan kesimpulan yang menggambarkan berbagai aspek penting dari pelaksanaan kurikulum tersebut dalam konteks pendidikan nasional (Waruwu 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merdeka belajar adalah suatu kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Nadhim Makarim. Ia mengungkapkan bahwasannya merdeka belajar adalah suatu tujuan memberikan ruang dalam pengembangan potensi pada diri peserta didik dengan kebebasan berfikir, kebebasan otonomi yang diberikan kepada elemen pendidikan (Hendri, 2020). Merdeka merupakan suatu kurikulum dalam dunia pendidikan yang memberikan keluasaan baik bagi seorang pendidik maupun peserta didik dalam melaksanakan sistem pendidikan yang terdapat dalam suatu lembaga. Namun dalam penerapan kurikulum ini tentunya perlu adanya penerapan bagi para guru sebelum diajarkan pada peserta didik. Sehingga konsep ini diharapkan mampu membentuk karakter peserta didik yang berkualitas tidak hanya bidang akademik namun juga berkembang dalam hal lainnya (Hendri, 2020) Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pengertian kurikulum merdeka belajar adalah suatu kurikulum pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Di sini, para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum atau program merdeka belajar ini diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim sebagai bentuk dari tindak evaluasi perbaikan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, dimana materi mata pelajaran akan dioptimalkan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pengajaran agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Kurikulum merdeka merupakan salah satu bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, dimana sebelumnya kurikulum merdeka disebut sebagai kurikulum prototipe yang kemudian dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, dengan tetap fokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi siswa (Mustaghfiroh, 2020).

Tujuan kurikulum yakni tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan serta tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Sedangkan isi kurikulum, berupa materi pembelajaran yang telah diprogramkan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Merdeka belajar berfokus pada kebebasan dan pemikiran kreatif. Dengan adanya kurikulum merdeka, pemerintah mengharapkan peserta didik dapat berkembang sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki karena dengan kurikulum merdeka mendapatkan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspresif, aplikatif, variative dan progresif. Dengan adanya perubahan kurikulum Merdeka diperlukan kerjasama, komitmen yang kuat, kesungguhan dan implementasi nyata dari semua pihak, sehingga profil pelajar pancasila dapat tertanam pada peserta didik. Asumsi utama merdeka belajar adalah pemberian kepercayaan kepada guru sehingga guru merasa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran.

Aspek yang Dikaji	Temuan Hasil Analisis
Pemahaman dan Kesiapan Guru	Guru memiliki pemahaman yang beragam terhadap Kurikulum Merdeka. Sebagian sudah menerapkan dengan baik, namun sebagian lainnya masih kesulitan dalam teknis pelaksanaan, terutama dalam menyusun modul ajar. Infrastruktur dan Sumber Daya Terdapat ketimpangan antara sekolah di perkotaan dan daerah 3T. Akses internet, perangkat digital, dan fasilitas pembelajaran masih terbatas di banyak wilayah.
Paradigma Pembelajaran Baru	Kurikulum Merdeka membawa pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis kompetensi, dan berpusat pada siswa. Konsep ini sesuai dengan kebutuhan abad 21.
Pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila	Umumnya diterima secara positif, namun

	<p>implementasi masih bersifat simbolik di beberapa sekolah. Diperlukan panduan dan praktik nyata yang lebih konkret. Sistem Evaluasi dan Monitoring Evaluasi pelaksanaan kurikulum masih terbatas. Diperlukan sistem monitoring yang sistematis dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas dan kendala implementasi.</p>
<p>Kebijakan Implementasi Bertahap</p>	<p>Pelaksanaan Kurikulum Merdeka dilakukan secara bertahap melalui sekolah penggerak. Hal ini menyebabkan perbedaan tingkat pelaksanaan antar sekolah.</p>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan penerapan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari reformasi pendidikan nasional. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berfokus pada pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik secara utuh. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi momentum penting yang memperlihatkan adanya ketimpangan dalam sistem pembelajaran, serta perlunya perubahan kurikulum yang lebih fleksibel dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Secara filosofis, Kurikulum Merdeka mengacu pada gagasan merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan dan otonomi yang lebih besar kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk merancang proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Kurikulum ini berlandaskan pada pembentukan Profil Pelajar Pancasila, yakni generasi yang memiliki karakter kuat, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebhinekaan global, serta bernalar kritis dan mandiri (Nurtanto, dkk, 2022). Dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan transformasi kurikulum yang tidak bersifat top-down (dari pusat ke bawah) secara ketat, melainkan bersifat fleksibel dan partisipatif. Sekolah diberikan pilihan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Ada tiga opsi yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan: tetap menggunakan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat (modifikasi dari Kurikulum 2013 selama pandemi), atau beralih ke Kurikulum Merdeka. Pendekatan sukarela ini ditujukan agar transisi berjalan mulus dan tidak membebani sekolah, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Pembelajaran berbasis projek untuk penguatan karakter dan soft skills melalui tema-tema kehidupan nyata.
2. Struktur kurikulum yang lebih sederhana dan fleksibel, di mana beban materi dikurangi agar guru dan siswa dapat lebih fokus pada pendalaman kompetensi esensial.
3. Penerapan pembelajaran yang terdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar dan potensi individu siswa, termasuk perbedaan kemampuan akademik, minat, dan gaya belajar.

4. Penghapusan sistem penjurusan di SMA sejak kelas X, agar siswa memiliki waktu mengeksplorasi berbagai bidang ilmu sebelum menentukan arah peminatan di jenjang berikutnya.

Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah menyediakan platform digital “Merdeka Mengajar” yang berfungsi sebagai sarana pelatihan, pengembangan kompetensi guru, penyedia perangkat ajar, dan asesmen diagnostik. Kebijakan ini tidak hanya memberikan ruang lebih luas kepada guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, tetapi juga menuntut guru untuk memiliki kapasitas pedagogik dan teknologi yang memadai. Namun, di balik semua itu, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah disparitas antarwilayah yang masih tinggi, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang sering mengalami keterbatasan dalam akses teknologi, jumlah guru, serta fasilitas belajar. Selain itu, tidak semua guru langsung siap beradaptasi dengan filosofi dan pendekatan baru dalam kurikulum ini. Oleh karena itu, pemerintah juga menyiapkan program pelatihan dan pendampingan intensif bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar pelaksanaan Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi formalitas kebijakan, tetapi benar-benar berdampak terhadap kualitas pendidikan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menyelaraskan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan global, tetapi tetap menjunjung nilai-nilai lokal dan karakter kebangsaan. Dengan pelibatan aktif semua elemen pendidikan – mulai dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga orang tua – Kurikulum Merdeka diharapkan mampu menjadi fondasi utama bagi pendidikan Indonesia yang lebih relevan, inklusif, dan transformatif (Hamid, 2022).

Analisis implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam menangani kehilangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 masih menghadapi tantangan baru di kalangan penyelenggara pendidikan. Walaupun sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan dukungan pemerintah sudah cukup baik, masih terdapat beberapa hambatan dalam menghadapi situasi riil di masyarakat, di mana kemampuan pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya terampil dan terbatasnya alokasi anggaran menjadi kendala. Tetapi, Kebijakan Merdeka Belajar tetap menjadi solusi terdepan dalam menghadapi tantangan pendidikan selama pandemi. Kebijakan ini memberikan peluang bagi siswa dan guru untuk belajar secara mandiri, mengeksplorasi beragam sumber pembelajaran tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dan merangsang pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Profesor Unifah Rosyidi dari UNJ menjelaskan pentingnya memahami beberapa aspek kunci untuk menerapkan program Merdeka Belajar. Ini termasuk transformasi kurikulum dan pembelajaran yang telah disetujui, perubahan dalam manajemen pendidikan nasional, serta perubahan manajemen pendidikan pada tingkat lokal dan otonomi sekolah. Dia juga menyoroti perlunya konsistensi kebijakan dan manajemen pendidikan antar kementerian, pemerintah pusat, dan daerah, yang dapat diperkuat dengan melibatkan National Education Council (NEC) dalam merumuskan kebijakan pendidikan presiden.

Hasil dari riset yang dilakukan oleh Sugiman dan koleganya menunjukkan bahwa program kebijakan Merdeka Belajar, terutama upaya penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lebih simpel, praktis, dan terpusat pada 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking, dan Creativity), memberikan manfaat besar bagi para guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih leluasa mengembangkan gagasan-gagasan pembelajaran mereka dan menjelajahi pengetahuan sesuai dengan bidang studi mereka. Dengan demikian, para guru dapat lebih fokus pada pengembangan proses pembelajaran, yang pada akhirnya membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam, karena guru tidak lagi terikat oleh perangkat pembelajaran yang rumit.

Riset Aan Widiyono dan Izzah Millati menunjukkan dampak besar teknologi pendidikan dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan evaluasi Merdeka Belajar di era 4.0. Teknologi pendidikan bukan sekadar alat, melainkan sistem dan proses yang membantu mencapai tujuan spesifik, terutama dalam konteks "Merdeka Belajar di era 4.0". Fokus utamanya adalah pada literasi, numerasi, dan pembentukan karakter. Diharapkan, hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan bermakna bagi peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Adnyani menunjukkan bahwa kebijakan ini memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan efisien di berbagai lokasi, asalkan terdapat fasilitas yang mendukung. Saat bermain sains, guru memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk bergerak, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, serta membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang penting dalam penyesuaian dengan lingkungan.

Berdasarkan informasi yang telah diungkapkan, kebijakan Merdeka Belajar memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peran guru. Sebagai agen kunci dalam dunia pendidikan, guru dapat menikmati peningkatan kebebasan dalam mengembangkan keterampilan mereka dalam proses pendidikan serta membantu membentuk generasi yang unggul sesuai dengan visi pemerintah untuk memajukan Indonesia menuju tahun 2045. Melalui Program Merdeka Belajar, peserta didik didorong untuk menjadi mandiri, sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang menekankan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, berperilaku baik, berinovasi, berkolaborasi, menghargai keragaman global, serta menjadi individu yang otonom. Ini mendorong peningkatan prestasi akademis mereka, tidak hanya dalam menguasai materi pelajaran, tetapi juga dalam kemampuan menganalisis dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Guru berperan sebagai pembimbing dan pelatih bagi peserta didik selama proses belajar dalam konteks ini. Selain itu, untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep Merdeka Belajar, diperlukan pelatihan bagi guru, penyampaian pemahaman dan motivasi kepada siswa, serta kerjasama yang terstruktur dan terarah antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari kebijakan Merdeka Belajar (Fadhilah Rahmafitri, dkk, 2024).

Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Perspektif Bimbingan Konseling: Analisis Peran Konselor, Layanan BK, Dan Supervisi Konseling Di Satuan Pendidikan

Implementasi Kurikulum Merdeka pada dasarnya tidak hanya membawa perubahan struktur kurikulum, tetapi juga mengubah paradigma pendidikan secara menyeluruh, termasuk cara satuan pendidikan memahami perkembangan peserta didik. Dalam konteks bimbingan konseling (BK), Kurikulum Merdeka membuka ruang baru bagi konselor sekolah untuk menjalankan fungsi yang lebih strategis dalam mendukung pembelajaran yang humanis, fleksibel, dan berpusat pada siswa.

Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran diferensiasi, asesmen diagnostik, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila. Hal ini sejalan dengan asas-asas BK yang menekankan layanan perkembangan, potensi individual, dan pentingnya pemahaman karakteristik peserta didik. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman guru dan konselor terhadap kurikulum masih beragam. Sebagian guru sudah dapat mengintegrasikan prinsip merdeka belajar, namun sebagian lainnya mengalami kendala teknis dalam penyusunan modul ajar dan pemahaman filosofi kurikulum. Situasi ini berdampak pada kualitas layanan BK karena konselor dituntut mampu memberikan pendampingan psikopedagogis bagi guru dan siswa.

Dalam perspektif psikologi pendidikan, pergeseran kurikulum menuntut konselor berperan aktif dalam membantu asesmen awal (diagnostic assessment), memetakan gaya belajar, minat, dan kesiapan psikologis siswa, memberikan rekomendasi strategi pembelajaran diferensiasi. Dengan demikian, BK bukan hanya layanan tambahan, tetapi menjadi elemen penting dalam memastikan proses belajar berjalan sesuai potensi masing-masing peserta didik. Kajian menunjukkan adanya ketimpangan fasilitas antara sekolah maju dan sekolah di daerah 3T, khususnya terkait internet, perangkat digital, dan literasi teknologi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga menghambat pelaksanaan layanan BK berbasis asesmen digital dan pengembangan modul layanan. Konselor sekolah di daerah terbatas sering harus mengambil peran ganda, yaitu penyedia dukungan psikososial bagi siswa yang mengalami hambatan belajar karena keterbatasan akses, fasilitator literasi teknologi bagi guru, mediator antara sekolah dan orang tua dalam memahami kebutuhan peserta didik dalam konteks Kurikulum Merdeka. Peran ini memperlihatkan pentingnya konseling masyarakat (community counseling) sebagai pendekatan untuk memperluas dukungan kepada keluarga, terutama di daerah terpencil.

Kurikulum Merdeka membawa pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Paradigma ini memberi peluang bagi konselor dalam mengembangkan program layanan dasar (*basic services*), bimbingan kelompok, layanan responsif, konseling individual, perencanaan individual (*individual planning*) yang semuanya harus selaras dengan capaian Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dan kegiatan intrakurikuler yang variatif memungkinkan konselor terlibat dalam pengembangan karakter, penguatan soft skills, dan pengelolaan emosi siswa. Melalui pendekatan ini, konselor dapat membantu siswa mengembangkan kecakapan sosial, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan kerja sama.

Temuan kajian menunjukkan bahwa implementasi Profil Pelajar Pancasila di sebagian sekolah masih bersifat simbolik. Padahal, secara esensial profil tersebut selaras dengan tujuan layanan BK, terutama dalam membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, berakhlak mulia, mampu berpikir kritis, mampu bersosialisasi secara sehat. Konselor memiliki peran strategis dalam menerjemahkan Profil Pelajar Pancasila melalui program pengembangan diri, layanan konseling perkembangan, pelatihan *life-skills*, kegiatan preventif tentang bullying, literasi digital, dan kesehatan mental. Dengan demikian, layanan BK menjadi jembatan penting antara tujuan filosofis kurikulum dan kondisi psikologis peserta didik.

Supervisi konseling menjadi aspek yang sangat penting namun sering diabaikan. Kurikulum Merdeka menuntut konselor memiliki profesionalitas tinggi, sementara kenyataan di lapangan menunjukkan kurangnya pengawas BK atau supervisor profesional, minimnya pelatihan reguler bagi konselor, kurang jelasnya panduan integrasi BK dalam kurikulum. Supervisi konseling diperlukan untuk menjaga kualitas layanan, memastikan layanan BK sesuai standar etika profesi, memberikan pendampingan teknis kepada guru BK dan konselor pemula, memastikan layanan selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka. Tanpa supervisi yang kuat, layanan BK akan sulit mendukung implementasi kurikulum secara optimal. Kurikulum Merdeka memberi ruang lebih luas untuk pengembangan well-being peserta didik. Dalam konteks sekolah pasca pandemi, konselor berperan penting dalam menangani *learning loss*, kecemasan belajar, demotivasi akademik, masalah adaptasi sosial, tekanan emosional akibat perubahan metode belajar. Konselor perlu mengintegrasikan layanan preventif, kuratif, dan perkembangan, sehingga siswa mampu menghadapi perubahan kurikulum dengan kesiapan psikologis yang baik.

SIMPULAN

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan perubahan signifikan dalam paradigma pendidikan Indonesia, terutama dalam pendekatan pembelajaran yang fleksibel, diferensiatif, dan berpusat pada peserta didik. Kajian menunjukkan bahwa pemahaman dan kesiapan guru serta konselor masih beragam, sehingga diperlukan penguatan kompetensi dan pendampingan berkelanjutan. Ketimpangan infrastruktur, terutama di daerah 3T, menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan pembelajaran maupun layanan bimbingan konseling (BK). Dalam konteks BK, Kurikulum Merdeka mempertegas peran konselor sebagai fasilitator perkembangan siswa melalui asesmen diagnostik, layanan responsif, bimbingan kelompok, serta penguatan Profil Pelajar Pancasila. Konselor juga berperan penting dalam menangani well-being siswa pasca pandemi. Namun, lemahnya sistem supervisi konseling dan terbatasnya sumber daya menjadi hambatan utama. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kolaborasi, kesiapan guru dan konselor, serta dukungan pemerintah dalam menjamin pemerataan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, One Maoera, and Cici Yulia. 2022. "Efektifitas Media Flashcard Untuk Meningkatkan Pemahaman Kemandirian Belajar Peserta Didik." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4(4):6003–14. doi: 10.31004/edukatif.v4i4.3635.
- Ahmad Almarisi, Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis, *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 7, no. 1 (2023): 111–117,
- Alaika M Bagus Kurnia, Dkk "Menyorot Kebijakan Merdeka Belajar", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2020), h.14.
- Fadhilah Rahmafritri, Elvi Deswita, dan Ridwal Trisoni, "Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan," *Dirasah: Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2024): 45–55.
- Fayrus, and Abadi Slamet. 2022. *Model Penelitian Pengembangan (R n D)*.
- Hamid, A. (2022). "Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(1), 14 –26.
- Hasanah, U., & Sunendar, A. (2023). Keterlibatan Orang Tua dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 12(2), 78 – 92.
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nofri Hendri, *Merdeka Belajar : Antara Retorika Dan Aplikasi*, (E -Tech Jurnal : 2020), Vol.8 No.1, h.2.
- Nugroho, R. (2023). Evaluasi Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 11(1), 23 –38.
- Nurtanto, M., Sofyan, H., & Nurhadi, D. (2022). "Implementation of Independent Curriculum Policy in Indonesia: Opportunities and Challenges." *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 3(2), 632 –642.
- Siti Mustaghfiroh, Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey, (*Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 2020), Vol. 3 No. 1, h.146.
- Sugiyono. 2022. "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)." *Metode Penelitian Kualitatif* 5.
- Waruwu, Marinu. 2024. "Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9(2):1220–30. doi: 10.29303/jipp.v9i2.2141.

EFFECT
Jurnal Kajian Konseling

EFFECT: JURNAL KAJIAN KONSELING

Vol. 3 No. 1 (2024) || <https://ejournal.yana.or.id/index.php/effect/>

p-ISSN 2829-7407 || e-ISSN 2829-7377